

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara republik merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. sebagai salah satu negara berkembang dan sedang melaksanakan pembangunan nasional secara berencana, terarah, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa serta negara lain yang telah lebih maju.

Sebagaimana dikemukakan Siagian (2003;2) administrasi didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Syafri (2012;11) administrasi ialah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja samasekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. karena kerjasama tersebut harus punya wadahnya yaitu organisasi.

Leonard D, White, administrasi ialah poses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, public atau privat, sipil, atau militer, sekala besar attau kecil (dalam syafri, 2012;9).

Sufian (2003:43) menyatakan bahwa organisasi-organisasi formal dicirikan dengan penyusunan berbagai kegiatan yang jelas, hubungan permanen, dan kekuasaan organisasi dan rencana terdahulu.

Desa merupakan suatu organisasi formal, menurut Hicks organisasi formal mempunyai struktur yang dinyatakan dengan baik yang dapat menggambarkan hubungan-hubungan wewenang, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Struktur juga menunjukkan saluran-saluran melalui aliran hubungan, organisasi formal mempunyai perincian pekerjaan yang jelas bagi tiap-tiap anggota. Jenjang tujuan organisasi formal dinyatakan dengan tegas. Status, gaji, pangkat dan lain-lain diatur dan dikontrol secara baik, keanggotaan dalam organisasi formal diperoleh dengan sadar, pada waktu tertentu, dan biasanya terbuka, beberapa contoh organisasi formal adalah perusahaan besar, pemerintah pusat dan daerah, universitas-universitas (dalam Sutarto, 1984:11-12)

Sufian (2003:43) menyatakan bahwa organisasi-organisasi formal dicirikan dengan penyusunan berbagai kegiatan yang jelas, hubungan permanent, dan kekuasaan organisasi dari rencana terdahulu.

Berdasar luas wilayahnya, desa merupakan suatu organisasi daerah, menurut Kuhn organisasi daerah luasnya meliputi suatu daerah tertentu sesuai dengan pembagian wilayah yang berlaku dalam suatu Negara. Misalnya Desa, Kecamatan, Kotamadya, Provinsi.

Desa merupakan wilayah yang memiliki otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa harusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintah desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan serta keterampilan

dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam sumber daya manusia, dan sumber daya alam (*human and natural resources*) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan (siswanto,2005;9)

Salah satu bentuk partisipasi warga masyarakat desa mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga –lembaga perwakilan sah yang memiliki kepentingan mereka. (DPRD, DPD, DPRD). Partisipasi menyeluruh dilihat dari kebebasan berkumpul, mengungkapkan pendapat, dan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Partisipasi mendorong setiap warga negara untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Segala proses perumusan kebijakan dan peraturan, proses penyusunan strategi pembangunan, tata-ruang, program pembangunan, penganggaran, pengadaan dan pemantauan.

Desa ini semulanya adalah daerah transmigrasi dengan nama Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) I SBP Sorek. Yang merupakan pemekaran dari Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar. Sedangkan awal penempatan dimulai pada bulan agustus tahun 1999 sampai dengan awal tahun 1990. Dengan jumlah penduduk : Penduduk laki–laki: 1.010 jiwa, Penduduk perempuan: 948 jiwa, jumlah penduduk: 1.958 jiwa, jumlah kepala keluarga : 500 KK dan di pertengahan tahun 1998 oleh Bapak Kepala Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi (KKUPT) diberi nama Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar. Hingga pada tanggal 22 desember 2002 Oleh Pemda Kabupaten Pelalawan secara resmi dan diakui dan ditetapkan menjadi Desa Divinitif Melalui Perda Nomor 61 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan Merupakan Pemekaran Dari Kabupaten Kampar Pada Bulan November Tahun 1999.

Berdasarkan keanekaragaman kondisi masyarakat maka sangat berpengaruh pada bentuk kebersamaan untuk mewujudkan rasa persatuan. Dalam hal ini sangat terasa melalui pengamatan kegotong royong masyarakat khususnya dalam pembangunan desa yang kini masih terbelah tertinggal dari desa lain karena tingkat partisipasi (keikutsertaan) masyarakatnya masih sangat terbatas.

Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan desa adalah keserasian antara keterbukaan pemerintahan desa terhadap bantuan yang masuk dan tingginya partisipasi masyarakat demi terwujudnya pembangunan desa khususnya pembangunan fisik yang sedang menjadi objek penelitian ini. Konsekuensi implementasi otonomi daerah yang diamanatkan dalam UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah desa, terdapat dalam pasal 206 yang mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan desa yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah/kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintah oleh peraturan perundang-undang diserahkan kepada desa.

Desa itu memiliki wilayah otonom atau kekuasaan dan wewenang sendiri untuk meningkatkan kewenangan dan kemandiriannya dalam membangun dan melakukan dalam pelaksanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan itu sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pembangunan dimaksud dalam konteks pengembangan masyarakat dapat dicermati sebagai suatu proses perencanaan pembangunan partisipatif yang mengakomodasi aspirasi masyarakat, berdasarkan potensi sumberdaya yang ada untuk memenuhi kebutuhan prioritas dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi Dan Deddy Supriyadi Bratakusumah,2005)

Pemikiran tentang pembangunan pada awalnya diartikan sama dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernasi. Pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan,perkembangan, dan modernisasi serta industrilisasi secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsip, karena masing-masing mempunyai latar belakang, asas dan hakikat yang berbeda meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi Dan Deddy Supriyadi Bratakusumah,2005).

Tikson (2005) menyebutkan bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Para ahli diatas berpendapat bahwa, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi Dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005)

Menurut Marbun (2002:113) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong

masyarakat. Pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam, dan mengembangkan sumber daya manusianya.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan, karena berhasil tidaknya pembangunan antara lain ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dari seluruh masyarakat. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik dalam bentuk sumbangan berupa uang atau harta benda, tenaga, termasuk ikut melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama mutlak diperlukan.

Jadi dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Bentuk partisipasi yang nyata yaitu :

- Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan
 - Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas
 - Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program
 - Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya
- Tjokromidjodjo (dalam jiana, 2004 : 30) mengemukakan tiga bentuk partisipasi

masyarakat:

1. Partisipasi dalam perencanaan
2. Partisipasi dalam melaksanakan pembangunan
3. Partisipasi dalam pemanfaatan

Menurut sufian (2003 : 289), partisipasi masyarakat perdesaan dalam pembangunan, dapat dilihat dari:

1. Sumbangan pemikiran masyarakat dalam pengambilan keputusan
2. Sumbangan tenaga masyarakat dalam kegiatan gotong-royong
3. Sumbangan dana dalam swadaya masyarakat dan
4. Pemeliharaan hasil-hasil pembangunan oleh masyarakat

Partisipasi penting bagi pembangunan dan bahkan salah satu tujuan pembangunan itu sendiri. Yakni, tergeraknya seluruh masyarakat dalam suatu proses pembangunan beerencana sesuai dengan arah dan strategi yang telah diteetapkan melalui suatu bentuk proses pembangunan itu sendiri diharapkan akan menimbulkan perluasan partisipasi.

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan didesa dan lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai mitra pemerintah desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Karna pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalannya perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan, tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat yang kurang baik menjadi baik secara seimbang dengan begitu kesejahteraan masyarakat bersama tercapai.

Dari penjelasan diatas Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti berkenan langsung atas kebijakan pembangunan. dalam hal ini perlu masyarakat dilibatkan baik dari formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakn tersebut, sebab merekalah yang

dianggap lebih tahu kondisi alam lingkungan desa tersebut. meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa, dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari aparaturnya pemerintah, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan, diperlukan sebuah sistem organisasi administrasi yang baik dan tertata rapi, sebagai mana diketahui bahwa negara telah dibagi menjadi daerah, provinsi, dan daerah provinsi dibagi lagi kepada daerah yang lebih kecil, yaitu kabupaten dan kota, yang telah mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. administrasi yang baik akan memberikan dampak yang baik bagi suatu daerah dan negara dalam menuju negara yang maju dan bisa bersaing dengan negara lain dan bisa menunjang pembangunan yang merata disetiap daerah. kewenangan daerah–daerah kemudian mengerucut menjadi kota kabupaten dan kemudian desa sebagai pangkal terbentuk sebuah desa untuk berkembang dengan adanya pembangunan tersebut maka perkembangan ekonomi dan segala aspek kehidupan masyarakat desa akan lebih baik dengan adanya perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat secara baik yang diatur Menurut Undang–Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa .

Dalam hal ini, pola pembangunan masyarakat desa yang dilaksanakantidak lagi hanya berdasarkan pada sistem perencanaan yang datangnya dari atas saja, akan tetapi bersamaan dengan itu pula digunakan pola pembangunan pedesaan yang didasarkan pada sistem perencanaan dari bawah. Berdasarkan hal itulah, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dituntut untuk lebih berperan aktif. Sebagai konsekuensi diterapkannya sistem perencanaan dari bawah, maka

masyarakat pedesaan dituntut pula untuk terlibat berperan secara aktif pada proses partisipasi masyarakat. Dalam Permendagri No 114 tahun 2014 pasal 15 tentang pedoman pembangunan desa yang berbunyi “

1. Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dilakukan secara partisipasi dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi
2. Pelibatan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan / atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya mendukung berjalannya roda pemerintahan, pemerintahan pusat, telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. maksud dan tujuan undang – undang tersebut adalah menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan antar daerah, karena dengan pembangunan daerah itulah yang akan dapat menjangkau pelosok negeri dengan adanya pelibatan masyarakat desa dalam pembangunan di desa karna masyarakat sekitar lah yang tau tentang kondisi desa apa yang dibutuhkan ada pun pedoman yang dijadikan acuan dalam partisipasi masyarakat dari pengambilan keputusan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dibahas dalam musyawarah dan menyepakati rancangan RPJMDesa supaya pembangunan yang dihasilkan tepat sasaran dan berdaya guna untuk masyarakat, bermanfaat untuk semuanya. Adapun unsur masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasinya dan kondisi sosial budaya desa itu sendiri. Yang dijelaskan dalam peraturan menteri dalam negeri (

Pemendagri No 114 tahun 2014 Pasal 25 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

1. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat
 - b. tokoh agama
 - c. tokoh masyarakat
 - d. tokoh pendidikan
 - e. perwakilan kelompok tani
 - f. perwakilan kelompok nelayan
 - g. perwakilan kelompok perajin
 - h. perwakilan kelompok perempuan
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
4. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Maka dari itu semua unsur masyarakat bisa ikut serta dalam memusyawarahkan sebuah pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan. Itu pentingnya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa serta pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga oleh masyarakat dengan membuat kebijaksanaan yang mendorongnya untuk berkembangnya partisipasi masyarakat desa.

Masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan karena adanya kesadaran bahwa pembangunan yang diprogramkan/dilaksanakan merupakan kebutuhan. Agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, maka ada tiga faktor yang secara pribadi harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat yaitu; kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Untuk menumbuhkan partisipasi itu, maka prasyarat dan unsur-unsur pendukungnya haruslah benar-benar diperhatikan, terutama kemauan,

kemampuan. Partisipasi merupakan salah satu unsur penting bagi pembangunan dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri. Partisipasi memberi perluasan kesempatan kerja, kesediaan dan kemampuan bekerja dari anggota masyarakat yang di dalamnya sebagai bentuk partisipasi yang paling besar.

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, maka pelaksanaannya hendaknya diarahkan kepada kepentingan masyarakat itu sendiri. Masyarakat mempunyai keyakinan bahwa yang dikerjakan itu merupakan kepentingan bagi mereka. Sehingga mereka melaksanakannya dengan penuh kesadaran yang tinggi dalam membangun desanya.

Jadi disini sangat jelas bahwa tanpa partisipasi (keikutsertaan) masyarakat dalam melaksanakan pembangunan tidak akan berhasil sebagaimana yang telah diharapkan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu faktor penentu akan keberhasilan pembangunan fisik desa dan juga adanya bantuan partisipasi oleh lembaga kemasyarakatan seperti BPD, Kepala dusun, kaur, RT, RW dan lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya.

Untuk merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat, pemerintah telah memberikan berbagai usaha yakni dengan memberikan bantuan berupa ADD (Alokasi Dana Desa) yang rutin setiap tahun dapat dari APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) untuk operasional pemerintah desa dan didalamnya terdapat anggaran untuk pembangunan fisik desanya. Bantuan ini bertujuan mendorong dan mengerakkan masyarakat untuk bergotong royong dalam membangun desa. Pembangunan desa menjadi penekanan utama adalah prakarsa dan swadaya masyarakat serta inspirasi masyarakat yang menjadi kunci utama terlaksananya pembangunan desa. Pemerintah hanya sebagai pembimbing, mengontrol serta memberikan dorongan masyarakat untuk

memelihara, menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa masyarakat. Maka masyarakat diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan dalam pembangunan di desa-surya indah dengan ide, gagasan, atau pun pendapat yang sekiranya bisa menjadi pembangunan yang terlaksana dengan baik sehingga prasarana dan sarana untuk kesejahteraan masyarakat tercapai karena apa bila masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan akan adanya rasa memiliki dari hasil pembangunan karena masyarakat ikut serta dalam membuat keputusan bersama-sama. Dari itu masyarakat harus ikut andil secara langsung supaya pembangunan tersebut dipelihara bersama-sama dengan masyarakat karena adanya rasa keterlibatan.

Dalam pelaksanaan di atas tidak terlepas dari peranan kepala desa, dimana kepala desa berperan untuk menentukan suatu keberhasilan dalam pembangunan masyarakat ke arah tujuan yang ingin dicapai.

Semua tidak terlepas dari tugas pemerintah desa dan masyarakat desa dalam menentukan arah dan tujuan untuk keberhasilan dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat atau semua elemen masyarakat harus ikut berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan seperti perencanaan atau partisipasi dalam pengambilan keputusan untuk sebuah tujuan yang diinginkan. Maka dari itu pemerintah desa dan masyarakat desa berhak membicarakan atau bermusyawarah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Seperti halnya yang dijelaskan dari tabel dibawah ini. Dimana kehadiran masyarakat umumnya sangat diperlukan untuk mendengarkan pendapat masyarakat dan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan.

Tabel 1.1: Daftar Hadir Rapat Hari Kamis 26 Nopember 2015 Partisipasi Masyarakat Dalam Menampung Usulan / Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016 – 2021 di Desa Surya Indah

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	H. Sugito	Kepala Desa
2.	Achmad Sagi	Sekretaris Desa
3.	Atep Deni	Kaur Pemerintahan
4.	Purwoto	Kaur Pembangunan
5.	Solih	Kaur Kesra
6.	Takrip	Masyarakat
7.	Muhamad	Masyarakat
8.	Nanda Roslisca	Pemuda
9.	Deden	Masyarakat
10.	Imam Mukayan	Pemuda
11.	Suhartini	Pkk
12.	Sri Ninggsih	Pkk
13.	M. Harnoko	RT 04/RW 04
14.	Suardi	Tokoh Masyarakat
15.	Gianti Ninggsih	Pkk
16.	Jumali	Pemuda
17.	Sutiyono	RT 05/ RW 04
18.	Abdul Rahman	Warga
19.	Maryam	Pkk
20.	Dewi	Pkk
1	2	3
21.	Mukaji	RT 06
22.	Dwi Ratna Andari	Pkk
23.	Elya Nelfa	Pkk
24.	Chozi Natulasrori	RT 02
25.	H. Sanuri	BPD
26.	Tini Setya	BPD
27.	Siti Kurasin	Pkk
28.	Dewi Yuniati	Pkk
29.	C. Prima N.	Pemuda
30.	Sufar	RT 04

31.	Supryono	RT 03 / 01
32.	Suparlan	Kadus 1
33.	Wawan	RT 01/ 02
34.	Gugun G.	RT 02/02
35.	Wawang	RT 03/02
36.	Samkodim	RT 03/03
37.	Suparman	RT 04/02
38.	H. Ali Imron	RW 02
39.	Suhari	RW 01
40.	Sugiono	RT 05

Sumber data : RPJMDes 2016

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pemikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah .sehingga keterlibatan masyarakat akan sangat penting dan pembangunan desa karna masyarakat desa dan lingkungan sekitar yang mengerti apa yang perlu dan tidak perlu dalam pembangunan. maka dari itu kesadaran masyarakat desa dalam pembangunan harus lebih aktif dan pemerintah desa haruslah lebih giat memberikan sosialisasi kepada masyarakat informasi apa yang akan terjadi di desanya sehingga masyarakat akan berinisiatih untuk ikut serta secara kesadaran masyarakat untuk ikut serta membangun desa yang baik dengan bersama masyarakat.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Juliantara (2004:84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.

Menurut Abe (2000:117-118) partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan akan memiliki 3 dampak penting, yaitu

- 1) masyarakat akan terhindar dari peluang manipulasi. Keterlibatan masyarakat secara langsung akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat,
- 2) memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, semakin banyak mereka yang terlibat maka akan semakin baik, dan
- 3) meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat. Dari penjelasan di atas maka keterlibatan masyarakat dalam proses kegiatan musyawarah rencanapembangunan desa diharapkan agar usulan-usulan pembangunan yang nantinya dihasilkan dari musyawarah tersebut benar-benar merupakan kebutuhan mayoritas masyarakat sehingga hasil dari realisasi pembangunan yang telah dirumuskan bersama memberikan manfaat kepada masyarakat banyak

Sesuai dari hasil dari berita acara musyawarah desa yaitu pembahasan BPD terhadap RPJMDesa 2016 – 2021 pada hari selasa tanggal 03 bulan nopember 2015 dimana dalam rapat tersebut telah disepakati mengenai pokok – pokok hasil musyawarah seagai berikut:

A. Menyepakati RPJMDesa 2016 – 2021 dengan rincian sebagai berikut :

B. Bidang pembangunan

- a. Pembangunan Ruang Publik
- b. Pembangunan Sumur Boor Skala Sedang Disetiap Lingkungan RT
- c. Drainase Jalan Jalur – Jalur Desa Yang Dirasa Perlu
- d. Pembangunan Pagar TK
- e. Pengadaan Alat Permainan TK
- f. Pemasangan Pafing Blok Halaman Kantor Desa Surya Indah
- g. Pembangunan Drainase Jaln Poros Desa
- h. Pembangunan Rukan Babinkantibmas
- i. Pembangunan Box Couver
- j. Servis Dan Perbaikan Gorong – Gorong Jalan Lingkungan
- k. Pembangunan Drainase Lapangan Sepak Bola
- l. Pembangunan Rumah Bidang Desa
- m. Pembangunan Kantor Desa Baru
- n. Pemasangan Pafing Blok Depan TK
- o. Pembangunan Gedung MDA
- p. Pembangunan Kantor Kepala Dusun
- q. Pemberian Imunisasi Dasar
- r. Pembangunan Panggun Terbuka Guna Pentas Seni
- s. Pengaspalan Jalan Lintas Desa Dari Jalan V11 Sampai Jalur 11

Berdasarkan pola pemikiran diatas yang dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dikabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai rencana pembangunan tahunan desa (RKPDesa) untuk dapat mendukung suatu pembangunan melalui anggaran yang ada di RKPDesa harus sesuai dengan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) untuk dapat menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran,dalam pembangunan yang disusun oleh pemerintahan pusat atau aparaturnya desa yang membahas tentang besarnya alokasi anggaran yang bersangkutan serta program dan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan cara,

pengalokasian anggaran pembangunan daerah akan dapat menjadi lebih terarah dan efisien serta dapat menjamin pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan APBDes sebagai berikut:

Kemudian berdasarkan penjelasan diatas tentang anggaran dalam bidang pelaksanaan pembangunan di desa surya indah sesuai dengan APBDes (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa), ini lah tabel dibawah yang menjelaskan perincian atau pelaporan berupa catatan keuangan dalam pengalokasikan anggaran pembangunan daerah dapat dilihat dibawah ini :

Tabell.2 : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Surya Indah Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan asli desa hasil usaha desa	20.000.000
2.	Pendapatan transfer	1.391.168.000
3.	Dana desa	616.590.000
4.	Alokasi dana desa	774.578.000
Jumlah pendapatan		1.411.168.000

Sumber APBDes 2016

Adapun sesuai dengan penjelasan tabel diatas tentang APBDes surya indah serta sumber pendapatan desa untuk memenuhi keperluan-keperluan pemerintah desa dan masyarakat desa adapun dana-dana yang dianggarkan untuk pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dibawah ini penjelasan tentang anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan fisik desa dan di table dibawah ini pelaporan dana dana yang digunakan kemudian dicatat sesuai dengan keperluan dalam pelaksanaan pembangunan. Anggaran-

anggaran ini didapatkan dari RPJMDes dan RKPDes surya indah dapat dilihat dibawah ini:

Tabel I.3 : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Surya Indah Tahun Anggaran 2016 Dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik desa	124.099.000
2.	Kegiatan pembangunan drainase	285.288.100
3.	Kegiatan pembangunan turap	55.870.900
4.	Kegiatan pembangunan normalitas parit	20.000.000
5.	Kegiatan pembangunan sumur bor	295.000.000
6	Kegiatan pembangunan sumur bor dangkal	14.338.000
7.	Kegiatan pembangunan sumur bor dalam	76.994.000
8.	Kegiatan pembangunan turap dan drainasse	100.000.000
Jumlah belanja		561.640.000

Sumber APBDes 2016

Dapat dilihat dari tabel diatas tentang penganggaran pengalokasikan dana desa dalam pelaksanaan desa atau disebut dengan APBDes (anggaran pendapatan belanja desa). Penjelasan diatas adalah kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam membuat sebuah transparansi untuk masyarakat umum dalam kegiatan pembangunan.serta sumber dana desa yang digunakan dalam hal pembangunanan ataupun sebagainya.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Pembangunan Birokrasi mengungkapkan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai dan memerlukan eksekutif jaringan, birokrasi yang efektif . (Setiawan, 2004 : 39)

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik menyatakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan tersebut ke dalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan Kebijakan administrasi dalam rangka meningkatkan program. (Harsono, 2002: 67).

Kemudian Putra (2003;80) mengatakan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya. Dari kedua pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannyadengan tujuan yang telah ditetapkan.Dapat dikatakan bahwa hubunganantara perencanaan dan pelaksanaan sangat erat.

Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho (2004:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan didalam menejemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui :

- a. Implementasi strategi
- b. Pengorganisasian
- c. Penggerakkan dan kepemimpinan

d. Pengendalian

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan Adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut Mustopadidjaja (2004:32), pelaksanaan merupakan tahapan dalam *policy cycle* (lingkaran kebijakan) dari keseluruhan proses kebijakanyang berlangsung dalam suatu *policy system* (sistem kebijakan) yang kompleks dan dinamik, serta akan menentukan berhasil atau gagalnya suatu kebijakan.

Dan penjelasan tentang pembangunan apa saja yang sudah terlaksana dalam pembangunan fisik desa dengan terlaksanan sebuah pembangunan maka kebutuhan masyarakat sudah mulai terpenuhi. Kemudian sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan

untuk merealisasikan sesuai kebutuhan masyarakat desa sehingga masyarakat desa surnya indah tidak merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti dibawah ini pelaksanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat setempat untuk ikut serta dalam memelihara dan memanfaatkan dan menggunakan pembangunan tersebut.

Dari data diatas pembangunan yang sudah terealisasikan baru beberapa saja yang sudah terlaksana namun yang penting untuk masyarakat seperti panggung pentas seni yang mana didesa surnya indah banyak seni tradisional seperti seni kuda kepong temangunan, seni kuda kepong blitaran, jaipong nasyid. Kadang masyarakat yang melakukan pelatihan di rumah-rumah masyarakat yang memiliki halaman luas untuk melakukan pelatihan.

Kemudian dibawah ini penjelasan dari tabel I.4 tentang pelaksanaan pembangunan bidang pelayanan dasar infrakstruktur di desa surnya indah yang sudah terealisasikan dan anggaran yang dibutuh dari setiap yang sudah terlaksanakan pembangunan fisik desa sebagai penjelasan tabel dibawah ini :

Tabel I.4: Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pelayanan Dasar Infrastruktur Di Desa Surnya Indah (Rkpdes) Yang Sudah Terealisasikan Di Desa Surnya Indah

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaa n	Biaya dan jumlah (Rp)	Sumber dana
	1	2	3	4	5	6
1	Pembanguna n Rukan Babinkantib mas	Jlr 7	1 unit	2016	80.000.000	APBDes
2	Renovasi Gedung MDA	Jlr 7	1 unit	2016	35.000.000	APBDes
3	Pembuataan sumur boor skala besar	Jlr 6	1 unit	2016	80.000.000	APBDes

4	Sumur Boor Skala Sedang		5 unit	2016	295.000.000	APBDes
5	Sumur boor skala kecil	Jlr 6	1 unit	2016	120.000.000	APBDes
5	Sumur boor skala kecil	Jlr 6	1 unit	2016	120.000.000	APBDes
6	Drainase	Jlr 8	200 m	2016	118.000.000	APBDes
7	Turap Draenase Lapangan	Jlr 6	100 m	2016	100.000.000	APBDes
8	Turap jalan	Jlr 5	40 m	2016	35.000.000	APBDes
9	Pembangunan Drainase	Jlr 6	-	2016	161.590.000	APBDes
10	Cuci parit	Desa	-	2016	20.000.000	APBKab

Sumber data: RKPDes 2016

Dapat dilihat dari tabel diatas pelaksanaan pembangunan yang sudah terealisasi sesuai dengan hasil musyawarah desa surya indah seperti adanya pembuatan sumur boor skala kecil, skala sedang dan skala besar, yang berarti pembuatan sumur boor skala kecil tergantung dari jumlah masyarakat yang ada jalur desa contoh di jalur 7 ada banyaknya masyarakat karna disitulah tempat berkumpul masyarakat desa dari setiap jalur, kemudian skala sedang berarti pembuatan pembangunan sumur boor ini dilakukan di setiap jalur desa untuk memudahkan kan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan berupa air. Sedangkan pembangunan sumur boor skala kecil ditempatkan di setiap jalur desa dan perkebunan kelapa sawit untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sumber data dari RKPDes ini dapat dilihat dari tabel diatas yaitu pelaksanaan pembangunan terencana strategis yang sudah dilaksanakan sesuai RKPDes maka kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dalam kehidupan bermasyarakat bersosialisasi bergotong royong untuk memanfaatkan dan memelihara

pembangunan yang ada sesuai dengan pemeliharaan pembangunan karna pembangunan dilakukan untuk dimanfaatkan dan didaya gunakan dalam kehidupan sehari hari saling meningkatkan pembangunan yang baik di desa surya indah. Sesuai dengan tabel diatas tentang pembangunan yang sudah ada untuk kebutuhan masyarakat sudah terealisasi, dengan begitu masyarakat bisa menggunakan dan memanfaatkan dari hasil bangunan yang sudah ada haruslah diperlihara dan dirawat dengan baik karna apabila sesuatu hal dirawat dengan baik akan memberikan dampak yang baik pula dalam kehidupan bermasyarakat didesa.

Adapun pembangunan yang tidak terealisasi atau belum dibangun namun penting untuk kebutuhan masyarakat di desa surya indah. Tabel dibawah ini akan memberikan informasi tentang pembangunan yang tidak terlaksana yang merupakan kebutuhan masyarakat dimana kebutuhan masyarakat tidak hanya satu namun bisa lebih karna kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam pemenuhan fasilitas untuk kesejahteraan masyarakat diukur juga dengan pemenuhan atau tercapainya pembangunan. tabel dibawah ini merupakan penjelasan pemabngunan yang belum dilakukan atau tidak teralisasi sebagai berikut :

Tabel 1.5 :Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pelayanan Dasar Infrastruktur Didesa Surya Indah (Rkpdes) Yang Belum Terealisasi Desa Surya Indah 2016

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Desa	Volume	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan jumlah (Rp)	Sumber dana
	1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan ruang publik	Surya indah	-	2016	-	-
2	Pembuatan jembatan cor anantara desa dan plasma	Surya indah	-	2016	150.000.000	-

3	Pengadaan alat permainan TK	Surya indah	-	-	-	APBKab
4	Pemasangan pafing blok halaman kantor desa	-	-	-	-	
5	Pembangunan box couver	Surya indah	-	-	50.000.000	APBDes
6	Pembangunan rumah bidan	Surya indah	-	-	150.000.000	APBKab
7	Pemasangan pafing blok TK	Surya indah	-	-	-	-
8	Pembangunan panggung terbuka pentas seni	Surya indah	-	-	-	-
9	Pengaspalan jalan besar lintas desa dari jalan V11 sampai jalur 11	Surya indah	-	-	-	APBDProv
10	Pembuatan saluran drainase	Desa	Disetiap dusun	2016	-	APBKab

Sumber data: RKPDes 2016

Berdasarkan tabel diatas pembangunan yang tidak terlaksana ini juga merupakan kebutuhan masyarakat dari 10 program pembangunan ini merupakan untuk kepentingan masyarakat dalam hal ini diperlukan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi hasil musyawarah, kemudian dari hasil musyawarah ada beberapa program yang tidak terlaksana disinilah masyarakat desa dan pemerinah desa untuk megevaluasi lagi kegiatan pembangunan apa lagi yang akan dilakukan walaupun harus bertahap namun pemenuhan kebutuhan masyarakat harus segera terlaksana.

Karna dalam dalam Undang Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa “ menjelaskan Masyarakat Desa berkewajiban membangun diri dan memelihara, lingkungan Desa, untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa yang baik. Dan mendorong terciptanya situasi yang aman, dan tentram di Desa untuk lebih memelihara dan menegembangkannya melalui permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan bergotong-royongan di desa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Seperti kemandirian masyarakat dalam melakukan pembangunan dengan bergotong royong bersama untuk memenuhi kebutuhan bersama serta keperluan masyarakat yang sangat penting untuk kehidupan bersama, kesejahteraan. Maka dari itu masyarakat di desa surya indah melakukan swadaya dalam pembangunan dapat dilihat dalam table dibawah ini yang merupakan pencatatan swadaya masyarakat dalam pembangunan fisik desa sebagai berikut :

Tabel 1.6 : Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2016

No	Jenis Pembangunan Fisik Desa	Bentuk Partisipasi	
		Uang	Barang
1	Kantor desa Kantor desa	40.000.000	-
2	Masjid	70.000.000	- 3 Mobil Batu Cor - 15 Truk Pasir - 35 Kardus keramik - 3 Kipas Angin - 9 Truk batu bata - 5 Buah Cat Tembok - 15 Atap seng - 1 Tempatkotbah

			(ceramah) - DLL.
3	Musholah	21.050.000	- 7 Truk pasir - 65 sak semen - Microfon - 3 Alat pembersih ruangan - 2 Kipas Ruangan - 1 Jam dinding
4	Pos Ronda	12.600.000	- 8 sak semen - 15 Batang Besi - 1 Truk Pasir - Pengecoran - 1 Kayu kubik - 350 Batu- Bata DLL.

Sumber : Masyarakat Desa Surya Indah, 2016

Dari tabel diatas, dana/bantuan yang berasal dari masyarakat desa surya indah sangat membantu untuk pembangunan didesa surya indah disamping terdapat juga berupa barang/jasa dari masyarakat setempat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sudah ada, tetapi kurang optimal karena masyarakat hanya sebagian yang ikut andil dalam memberikan sumbangan berupa materi. seperti halnya pembangunan kantor desa yang masyarakatnya berpartisipasi dari bentuk uang dari iuran masyarakat desa surya indah untuk melakukan pembangunan tidak adanya bantuan yang berupa non materil atau gotong royong masyarakat untuk lebih menghemat dana serta menjalin keakraban masyarakat desa surya indah karna didesa surya indah banyak terdapat suku, budaya, agama dan ras. Maka penting keterlibatan masyarakat dalam pastisipasi untuk membangun desanya sendiri untuk lebih mandiri.

Kemudian dengan adanya swadya masyarakat dalam pembangunan masjid yang menurut saya keterlibatan masyarakat sudah cukup baik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam meningkat fasilitas karna adanya masjid yang merupakan rumah ibadah

untuk umat islam sudah terpenuhi meskipun belum optimal untuk melakukan pembangunan yang baik namun dengan adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk dana atau barang untuk melakukan pembangunan sudah cukup baik. Karna mesjid ini merupakan rumah ibadah utama berkumpulnya masyarakat desa surya indah untuk melakukan kegiatan tentang keagamaan seperti sholat jum'at, maulid nabi atau sebagainya.

Sedangkan pembangunan musholah disetiap jalur merupakan pemenuhan kebutuhan fisik masyarakat yang ada disetiap jalur untuk menunaikan ibadah secara bersama-sama dengan masyarakat yang ada dijalur tersebut. Dalam pembangunan mushola sudah bagus dengan adanya kemandirian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri karna masyarakatlah yang aktif dalam melakukan pembangunan, tidak harus bergantung dari dana desa atau dari aparatur desa. Tapi masyarakat juga bisa melakukan pembangunan dengan adanya rasa bersama-sama, rasa memiliki bangunan tersebut akan lebih terasa kegunaannya untuk dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik.

Selanjutnya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat adalah pos ronda yang merupakan fasilitas yang bersifat fisik yang perannya sangat penting untuk masyarakat desa surya indah sendiri untuk melakukan kegiatan masyarakat dalam menjaga keamanan desa surya indah dan menjaga kesejahteraan masyarakat desa. Maka dari itu pembangunan fisik desa sudah tersedia haruslah digunakan dengan baik dengan merawat dan memelihara hasil dari pembangunan dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel I.7 Pelaksanaan Pembangunan Dalam Bentuk Pemeliharaan Dari Hasil Pembangunan Fisik Desa

no	Jenis pembangunan fisik	Lokasi	Volume	Sasaran manfaat	Sumber dana
	gedung MDA	Desa surya indah jalur 7	5 unit/thn	Estetika sebuah sekolah	APBDes
	Pagar TK	Desa surya indah jalur 7	150m/thn	Estetika sebuah sekolah	APBDes
3	Servis dan perbaikan gorong-gorong jalan lingkungan	Desa surya indah jalur 7, jalur 8	-	Memperlancar transportasi masyarakat	Masyarakat
4	Perbaikan lapangan	Desa surya indah jalur 6	-	Penataan fungsi lapangan	APBDProv
5	Perawatan gedung posyandu	Desa surya indah jalur 7	12 kali/thn	Senantiasa nampak bersih/rapi	APBDes
6	Cuci parit	Desa surya indah	5000m/thn	Supaya tidak terjadi banjir	APBDes
7	Pemeliharaan gedung kantor dan balai desa	Desa surya indah	2 kali/thn	Dapat digunakan sesuai fungsinya	APBDes
8	Mesjid	Desa surya indah jalur 7	8 kali/thn	Untuk rumah ibadah dan berkumpul	APBDes

Sumber data RKPDes 2016

Dapat dilihat dari tabel diatas pelaksanaan partisipasi masyarakat desa dari sgi pemeliharaan, merawat hasil pembangunan fisik yang telah ada walaupun sebgiaan kecil yang dilakukan pemeliharaan dalam pembangunan namun sudah membantu dan ikut terlibat dalam pemeliharaan hasil pembangunan yang merupakan sarana dan prasarana sangat penting untuk kehidupan masyarakat desa surya indah.

Pemeliharaan suatu pembangunan atau bangunan yang bersifat fisik harus lah dirawat sesuai fungsinya dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu juga

merupakan partisipasi dalam pemanfaatan hasil dari suatu bangunan sehingga bangunan yang dibangun tidak sia-sia karena menjaga, memelihara merawat hasil pembangunan yang diperoleh dari kemauan masyarakat itu sendiri jadi semua masyarakatlah yang harus memeliharanya jadi rasa kepemilikan masyarakat haruslah lebih. Jangan mengakibatkan sebuah bangunan rusak dan kosong kurang dari segi perawatan dan memelihara ketercapaian efektif dan efisien.

Pemanfaatan adalah Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Hasil pembangunan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai fungsinya dan digunakan untuk kepentingan masyarakat berupa fasilitas sekolah SD, TK, dan MDA serta hasil pembangunan lainnya untuk kebutuhan masyarakat dan keperluan masyarakat. Serta pemanfaatan masyarakat dalam hal keterlibatan masyarakat atau keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan sumur bor yang penting untuk masyarakat dalam hal kebutuhan masyarakat desa berupa air bersih sehingga apa bila ada musim kemarau masyarakat tidak bersusah payah untuk mencari air.

Maka dari itu dengan adanya proses pembangunan desa dan diikuti sertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun desa kearah yang lebih baik, kemajuan, kesejahteraan serta merubah pola pikir yang tadinya lebih mementingkan kepentingan sendiri harus lebih kompresif dalam memecahkan sesuatu masalah secara

bersama karna masyarakat desa yang bersifat heterogen harus dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat dalam membangun desa yang terarah, terencana tersusun dan sistematis. Kemudian masyarakat harus lebih memperhatikan kemajuan desa serta kesejahteraan bersama. Bersama-sama menjaga memelihara, menjaga, dan merawat dari hasil pembangunan. Kesejahteraan masyarakat desa akan terjadi jika pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan pembangunan itu tidak luput dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakatlah yang memiliki posisi paling penting dalam proses pembangunan, misalnya dalam pemberian usulan pembangunan, perencanaan, perawatan, pengawasan, penjagaan hasil pembangunan dan mengevaluasi.

Dari penjelasan diatas serta penelitian yang saya lakukan di desa surya indah terdapat fenomena ataupun permasalahan yang terjadiseperti :

1. partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat pada saat pelaksanaan musyawarah pembahasan RPJMDes surya indah 2016-2021 hanya masyarakat diluar pengurus desa, data ini diperoleh dari daftar hadir musyawarah pembahasan RPJMDes surya indah, namun kenyataannya masyarakat yang ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan fisik desa belum adanya kesadaran masyarakat itu sendiri untuk ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan fisik desa.
2. partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi pembangunan karna banyaknya program pembangunan yang belum selesai seperti, pembangunan ruang publik, pembuatan jembatan cor antara desa ke plasma perkebunan kelapa sawit, pembangunan panggung pentas seni. Yang merupakan kebutuhan masyarakat karna masyarakat disana bermata

pencarian sebagai petani pentingnya masyarakat ikut andil dalam partisipasi mengevaluasi hasil pembangunan serta program pembangunan yang belum dilakukan.

3. pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam hal pemeliharaan hasil pembangunan fisik desa berupa gedung MDA, pagar TK, perbaikan lapangan, servis gorong-gorong dan lain sebagainya yang berasal sumber dana dari APBDes sedangkan peran masyarakat dalam pemeliharaan hanya sebagian dari masyarakat desa.

B. Rumusan Masalah

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dimaksud adalah memberikan bantuan berupa tenaga untuk pelaksanaan pembangunan, yaitu ikut setanya masyarakat dalam gotong royong melaksanakan pembangunan fisik. Selain itu juga pembangunan fisik yaitu kemampuan masyarakat dalam memeberikan bantuan uang atau benda untuk menambah dana bantuan pembangunan.

Pada umumnya sebagai tolak ukur partisipasi masyarakat adalah dilihat dari keikutsertaan atau besar kecilnya masyarakat ikut andil dalam pembangunan fisik, seperti bangunan sekolah, masjid, musholah, kator desa sehingga bisa terpelihara dan dimanfaatkan dengan baik. Tetapi hal tersebut ada kecenderungan belum terlaksananya dengan baik, masih mengalami hambatan karena bangunan-bangunan yang sudah ada hanya dimanfaatkan tetapi tidak terpelihara serta dengan pengembangannya yang minim sekali.

Dari uraian berbagai fakta penelitian yang dijelaskan diatas tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa sudah lumayan cukup bagus dalam pelaksanaannya dan masyarakat pun dapat

menggunakan dan memanfaatkan hasil dari pembangunan tersebut secara baik dan benar. Maka penulis tertarik untuk merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa surya indah kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan.
2. Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat dalam mengevaluasi hasil pembangunan program perencanaan yang belum terealisasi dan mengevaluasi dari hasil pembangunan.

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak.
2. Untuk mengetahui apakah masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan dan mengevaluasi dari program pembangunan yang sudah terealisasi dan perencanaan program pembangunan yang belum terealisasi apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat akademik, yaitu sebagai data sekunder (berupa data-data dan informasi) bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama.
- b. Manfaat teoritis, yaitu dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Manfaat praktis, yaitu dapat digunakan bagi instansi-instansi terkait untuk merumuskan suatu kebijakan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau